

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Konsep keberlanjutan telah menjadi topik diskusi global dalam beberapa tahun terakhir. Keberlanjutan berulang kali dianggap sebagai tujuan penting oleh pemerintah, bisnis, organisasi non – pemerintah, hingga konferensi nasional dan internasional. Namun, penerapan konsep ini sering kali disertai dengan ketidakpastian, ambiguitas, dan kontradiksi. Laporan Brundtland oleh WCED (1987) menyebutkan bahwa pembangunan berkelanjutan merupakan upaya untuk memenuhi kebutuhan masa kini tanpa mengorbankan kebutuhan generasi mendatang (Godemann & Michelsen, 2011, h.5). Konsep ini tidak hanya mencakup aspek ekonomi dan lingkungan, tetapi juga berakar pada budaya, persepsi dan tindakan sosial, serta bagaimana cara masyarakat memahami dan merespons isu lingkungan sangat dipengaruhi oleh konteks budaya, sehingga keberlanjutan memerlukan keterlibatan aktif dari setiap individu (Godemann & Michelsen, 2011, h.5).

Kesadaran akan pentingnya partisipasi masyarakat dalam pembangunan berkelanjutan diperkuat dengan ditetapkannya *Sustainable Development Goals* (SDGs) pada tahun 2015 sebagai respons terhadap kegagalan *Millenium Development Goals* (MDGs) yang dinilai terlalu *top – down* (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018, h.2). SDGs mengusung pendekatan yang menekankan keseimbangan antara kesejahteraan masyarakat (*people and profit*), dan keseimbangan lingkungan (*planet*) demi keberlanjutan generasi mendatang (Alisjahbana & Murniningtyas, 2018, h.6). Inilah yang menjadi esensi dari pembangunan berkelanjutan.

Agenda 2030 dengan berprinsip *no one left behind* menuntut semua negara untuk mengukur capaian SDGs, menetapkan tujuan, target, dan membangun tata kelola yang lebih efektif (Morita *et al.*, 2020; United Nations, 2015). Laporan *Sustainable Development Solutions Network* (2023), mencatat bahwa capaian global stagnan sejak 2020. Meski Indonesia sempat masuk kategori negara paling progresif (SDGs Indonesia, 2024), mengalami penurunan skor menjadi 69,4 dari skala 100 dengan peringkat dari 75 menjadi 78 dari 167 negara (SDG Transformation Center, 2024). *United Nations ESCAP* (2024), memproyeksikan kawasan Asia Pasifik, termasuk baru akan mencapai target SDGs pada 2062 atau 32 tahun lebih lambat dari target (Astuti, 2024).

Kendala utama Indonesia karena kurangnya keterlibatan aktor non – negara dan menyebabkan lemahnya fungsi konektivitas dalam penetapan visi dan tujuan SDGs (Morita *et al.*, 2020). Kompleksitas tata kelola dan krisis kepercayaan publik yang turut menghambat partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan SDGs (Guha & Chakrabarti, 2019; Sunarto, 2024). Dalam hal ini, komunikasi berperan sebagai proses sosial yang memungkinkan terjadinya pertukaran pemikiran dan nilai – nilai keberlanjutan, membangun kesadaran kritis, serta mendorong kolaborasi banyak pihak (Heinrichs *et al.*, 2016).

Kompleksitas dan ketidakpastian isu keberlanjutan memerlukan komunikasi yang efektif antar aktor untuk mengembangkan pemahaman bersama tentang tindakan yang harus diambil (Newig *et al.*, 2013). Dalam hal ini, komunikasi keberlanjutan memiliki peran penting dalam mendorong partisipasi masyarakat, membangun pemahaman bersama tentang isu lingkungan, menjembatani antar bidang keilmuan (interdisipliner), serta menghubungkan akademisi dengan masyarakat (Rejeki & Pranata, 2024). Oleh karena itu, pendekatan transdisipliner yang

kontekstual menjadi relevan di Indonesia untuk mendorong dialog antar pihak, yang memungkinkan integrasi pengetahuan ilmiah dan lokal guna menciptakan solusi kolaboratif.

Isu keberlanjutan bersifat kontekstual dan tidak bisa dilepaskan dari budaya lokal setempat. Bahasa ilmiah seperti “pemanasan global” atau “emisi karbon” sering sulit dipahami oleh masyarakat lokal. Misalnya, degradasi lahan gambut di Kalimantan Tengah akibat alih fungsi lahan yang masif yang menyebabkan emisi terus menerus dan kebakaran hutan. Upaya restorasi dari pemerintah memerlukan pemahaman terhadap persepsi dan partisipasi masyarakat Dayak, yang berperan sebagai pengendali sosial bagi segala tindakan dan perilaku masyarakat, sehingga tidak saling merugikan (Ramdhan, 2018).

Sementara, di negara maju seperti Amerika Serikat pendekatan keberlanjutan lebih berbasis kebijakan dan sains, seperti restorasi lahan, reforestasi dan konservasi lahan basah sebagai upaya untuk mengurangi emisi karbon serta meningkatkan penyimpanan karbon di ekosistem alami. Pendekatan menyumbang hingga 21% pengurangan emisi gas rumah kaca tahunan. Strategi ini didukung oleh regulasi dan kebijakan intensif finansial (Fargione *et al.*, 2018). Hal ini menegaskan pentingnya adaptasi strategi global dengan kondisi sosial, ekonomi dan budaya lokal di setiap wilayah. Sebagaimana dijelaskan Godemann & Michelsen (2011,h.4), apa yang pada prinsipnya tersedia di seluruh dunia belum tentu tersedia secara lokal.

Kearifan lokal merupakan nilai, norma, etika, kepercayaan, adat istiadat, hukum adat, dan aturan khusus yang diwariskan secara turun temurun dalam masyarakat. Meskipun bersifat lokal, nilai – nilai ini cenderung bersifat universal, terutama dalam pelestarian sumber daya alam dan keberlanjutan lingkungan (Sartini, 2004). Sebagai aset penting dan berharga, kearifan lokal dijadikan sebagai pedoman kehidupan bermasyarakat dan sumber pengetahuan yang

mendukung keberlanjutan sumber daya alam, serta gaya hidup masyarakat (Pesurnay, 2018; Suarsa *et al.*, 2019).

Integrasi kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan menjadi penting, mengingat kegagalan pembangunan di masa lalu sering terjadi akibat dominasi pengetahuan akademis yang mengesampingkan pengetahuan dan praktik lokal (Mungmachon, 2012). Pengetahuan masyarakat adat telah lama berkontribusi terhadap praktik keberlanjutan melalui tradisi, nilai, aturan, cara pandang, serta cara masyarakat mengelola sumber daya alam secara berkelanjutan yang berakar pada pengetahuan tradisional dan sistem pemerintahan adat (Magni, 2017). Oleh karena itu, kearifan lokal perlu diintegrasikan dalam praktik pembangunan berkelanjutan agar selaras dengan realitas sosial dan lingkungan setempat.

Bali menunjukkan komitmen terhadap pembangunan berkelanjutan melalui visi *Nangun Sat Kerthi Loka Bali*, yang sejalan dengan *Sustainable Development Goals* (SDGs), namun lebih kontekstual karena berakar pada kearifan lokal (BaliTopik.com, 2024). Pemerintah daerah berupaya mewujudkan pembangunan yang selaras dengan konsep *Tri Hita Karana* – keharmonisan hubungan manusia dengan Tuhan (*Parahyangan*), manusia dengan sesama (*Pawongan*) dan manusia dengan alam (*Palemahan*) (Susanti, 2023). Konsep ini telah diadopsi dalam berbagai kebijakan pembangunan di Bali, seperti pengelolaan lingkungan dan tata kelola irigasi *subak* yang diakui UNESCO sebagai warisan dunia (Roth & Sedana, 2015). Namun, implementasi *Tri Hita Karana* belum sepenuhnya substansial dan sering kali hanya bersifat sebagai simbolis, sehingga nilai – nilainya perlu benar – benar diadopsi secara serius dalam kebijakan pembangunan dan dampaknya terhadap ketiga elemen utama di dalamnya.

Proyek Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali menjadi contoh integrasi kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan melalui adopsi nilai *Tri Hita Karana*, yang dinilai sebagai saripati dari 17 tujuan SDGs (Kompas TV Dewata, 2023). Konsep keberlanjutan di kawasan ini dipandang sebagai gaya hidup, tercermin dari pembangunan infrastruktur berstandar internasional yang ramah lingkungan, seperti sistem saluran air, pembangkit listrik ramah lingkungan, jalur pejalan kaki dan sepeda, serta pengelolaan limbah berkelanjutan. Proyek ini bertujuan mengembangkan pusat wisata marina dan budaya terpadu kelas dunia yang berkelanjutan, serta meningkatkan kapasitas sumber daya manusia untuk mendukung pencapaian SDGs (Kura Kura Bali, 2024). Gubernur Bali, I Wayan Koster, menyampaikan bahwa proyek ini mendorong pergeseran dari *mass tourism* menuju *quality tourism* (Indonesia SEZ, 2024).

Berbagai penelitian terdahulu menegaskan pentingnya kearifan lokal dalam mendukung pembangunan keberlanjutan. Sharma & Ji (2024) dalam judul *Linkages between Traditional Water Systems (TWS) and Sustainable Development Goals (SDGs): A case of Govardhan, India* meneliti sistem pengelolaan air tradisional yang berkontribusi langsung pada pencapaian SDGs. Hasilnya menunjukkan bahwa praktik secara tradisional dalam pengelolaan sumber daya air berkontribusi pada aspek keberlanjutan lingkungan dan sosial yang mencakup akses terhadap air bersih dan perlindungan terhadap ekosistemnya. Temuan ini menunjukkan bahwa praktik lokal bukan sekedar warisan budaya, tetapi juga aset penting dalam strategi keberlanjutan.

Pada konteks komunikasi pembangunan, Pupung & Ardhiansyah (2020) dalam penelitian yang berjudul “Penerapan Komunikasi Pembangunan Berkelanjutan dalam Pengelolaan Desa Wisata Berbasis Kearifan Lokal di Yogyakarta”, menunjukkan bahwa prinsip gotong royong

dan kolektivisme masyarakat lokal menjadi kunci keberhasilan dari pengelolaan desa wisata berkelanjutan. Komunikasi berperan dalam meningkatkan kesadaran, serta keterlibatan masyarakat melalui diskusi atau pelatihan yang disediakan oleh pengelola desa wisata.

Penelitian Suarsa dkk. (2019) dalam *“Local Wisdom Values Governances as Non-Financial Intangible Assets in Supporting Indigenous People’ Sustainability in Kampung Pulo Kabupaten Garut”*, berfokus pada kearifan lokal masyarakat Pulo yang dipertahankan dan dikelola sebagai aset tak berwujud non – finansial yang mendukung keberlanjutan komunitas adat. Tujuan penelitian ini lebih ke menjaga eksistensi komunitas adat yang ada di Kampung Pulo, Kabupaten Garut melalui pelestarian budaya dan nilai sosial.

Sementara, penelitian oleh Ramadhani & Prihantoro (2020) yang berjudul *“Development Communication Strategy by Bojonegoro District Government on Applying Nawacita and Sustainable Development Goals”*. Menyoroti strategi komunikasi pembangunan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro dalam mengomunikasikan Nawacita dan SDGs. Penelitian ini menemukan bahwa pendekatan yang digunakan meliputi strategi berbasis media, partisipatori, desain instruksional dan pemasaran berbasis budaya. Meskipun penelitian ini menekankan integrasi program keberlanjutan dalam visi pemerintah daerah, penelitian ini belum secara spesifik membahas peran kearifan lokal dalam komunikasi keberlanjutan, terutama di sektor swasta.

Meskipun peran kearifan lokal dalam pembangunan berkelanjutan telah banyak diakui, sebagian besar penelitian sebelumnya masih berfokus pada konteks komunitas adat, pengelolaan sumber daya alam dan program pemerintah daerah. Pendekatan yang digunakan cenderung bersifat sektoral dan terbatas pada pemanfaatan kearifan lokal sebagai nilai budaya atau praktik tradisional semata. Kebaruan penelitian ini terletak pada fokus kajiannya yang

menyoroti praktik komunikasi keberlanjutan dengan mengintegrasikan nilai – nilai lokal dalam konteks pembangunan KEK Kura Kura Bali sebagai bagian dari pencapaian SDGs. Penelitian ini menawarkan kontribusi karena berupaya menghubungkan dua ranah yang kerap berjalan terpisah, yakni antara perspektif global mengenai SDGs dan dinamika lokal yang tercermin dalam nilai – nilai lokal di Bali.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan pemaparan latar belakang tersebut, maka rumusan masalah penelitian adalah: Bagaimana proses integrasi kearifan lokal dalam komunikasi keberlanjutan yang dilakukan oleh PT Bali Turtle Island Development untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali?

1.3 Tujuan Penelitian

Penelitian ini bertujuan untuk mendeskripsikan integrasi kearifan lokal dalam komunikasi keberlanjutan yang dilakukan oleh PT Bali Turtle Island Development untuk mendukung pencapaian *Sustainable Development Goals* (SDGs) di Kawasan Ekonomi Khusus Kura Kura Bali. Secara spesifik, penelitian ini bertujuan:

- a. Mendeskripsikan tahapan pembangunan KEK Kura Kura Bali dan integrasi kearifan lokal ke dalam proses komunikasi tersebut.
- b. Mengidentifikasi nilai – nilai lokal yang diadopsi.
- c. Mengidentifikasi pemangku kepentingan yang terlibat.
- d. Mendeskripsikan tantangan yang dihadapi dalam proses integrasi kearifan lokal ke dalam proses komunikasi tersebut.

1.4 Manfaat Penelitian

1.4.1 Manfaat Akademis

Manfaat akademis dari penelitian ini adalah diharapkan menjadi acuan bagi peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian mengenai integrasi kearifan lokal dalam komunikasi keberlanjutan untuk mendukung pencapaian SDGs.

1.4.2 Manfaat Praktis

Manfaat praktis dari penelitian ini memberikan panduan bagi PT BTID dalam mengintegrasikan kearifan lokal ke dalam komunikasi keberlanjutan untuk meningkatkan penerimaan masyarakat dan mendukung pencapaian dari SDGs. Selain itu, diharapkan kearifan lokal dapat menjadi pedoman fundamental yang harus diperhitungkan oleh dalam praktik keberlanjutan yang berdampak nyata bagi masyarakat setempat.